

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah adalah wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk mencapai *good governance*. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna kebutuhan informasi laporan keuangan tersebut seperti masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar

kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007;3).

Menurut Sembiring (2013) Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang mungkin mempegaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Seperti kita ketahui bahwa total volume

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010)

Namun, pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi di

instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. (Indriasari dan Naharyanto, 2008)

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Akan tetapi selain sumber daya manusia dan teknologi informasi ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu sumberdaya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut. (Ariesta, 2013)

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan

(c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administrative. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan system akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Alasan Kabupaten Grobogan dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, selama tahun 2009 sampai tahun 2013, LKPD Kabupaten Grobogan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (BPK RI, 2014). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan pencatatan dan pengamanan aset belum memadai, pengendalian internal atas persediaan pada beberapa SKPD belum dilaksanakan dengan tertib, penyajian piutang dan aset lainnya dari tagihan penjualan angsuran yang tidak didukung rincian data yang memadai dan realisasi dana BOS tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan yaitu andal. Selain itu Kabupaten Grobogan telah menerapkan otonomi daerah dan kabupaten ini telah menyelenggarakan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki

baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bernilai dan akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Desi Dwi Mahyani (2009) dengan menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi dengan responden dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.
3. Mengetahui pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian

intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian, mencakup teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data, dan pengujian hipotesis. Bab ini merupakan landasan dalam menganalisis data.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian berikutnya.